

## BAB II

### GAMBARAN PEMERINTAHAN TURKI SEBELUM TAYYIP ERDOGAN

Pada bab II ini akan diuraikan haluan politik luar negeri Turki sebelum Tayyip Erdogan. Kemudian akan diuraikan politik Luar Negeri Turki terhadap Arab-Israel Sebelum Tayyip Erdogan.

#### A. Haluan Politik Luar Negeri Turki Sebelum Tayyip Erdogan

Pada era sebelum Erdogan, Turki merupakan negara sekuler yang orientasi kebijakannya cenderung mengarah pada **negara Barat (pro Barat)**. Hal tersebut merupakan doktrin Kemalisme yang ingin melakukan modernisasi pada Turki. Modernisasi yang dimaksud adalah *taking place in the civilization of Europe*<sup>15</sup>. *Western civilization* sering kali merujuk pada Eropa bagian Barat, terutama Inggris dan Prancis. Turki menjadikan negara Barat sebagai referensi bahkan aliansi pada saat itu. Dua orientasi yang paling utama dalam setiap kebijakan Luar negeri Turki. Yang pertama adalah menjaga eksistensi negara sesuai kedaulatannya dan membangun kembali fondasi-fondasi berbangsa dan bernegara, yang kedua adalah merealisasikan formasi kebijakan luar negeri western oriented dengan mengalihkan konsentrasi ke Barat<sup>16</sup>. Hingga pasca perang dunia 2 berakhir, Turki masih

---

<sup>15</sup> Heri Cahyadi.2012. “agresivitas Turki middle eastern regional secusity complex periode AKP 2002-2011: tantangan Turki terhadap konsep insulator, (Tesis magister, jurusan HUBungan Internasional universitas Indonesia, Jakarta).

<sup>16</sup> Gulbahar Yelken Aktas, 2010. “Turkis foreign policy: new concept and reflection”, (Tesis Graduate School of Social Science, Middle East Technical University, Desember.

menjadi bagian Barat yang terus menjalin kerjasama. Hingga pada tahun 1952 Turki akhirnya bergabung dengan pakta pertahanan Atlantik Utara, atau biasa disebut NATO. Turki mempunyai peran untuk menjaga persebaran komunisme di kawasan Eropa Timur pada saat itu. Berbagai bantuan militer dan ekonomi diberikan kepada Turki oleh Amerika dengan tujuan agar Turki menjadi negara yang kuat dalam militer dan stabil dalam ekonomi. Kedekatan Turki dengan Barat terjadi hingga awal tahun 2000. Termasuk kedekatan Turki dengan sekutu Amerika di Timur Tengah lainnya yaitu Israel. Turki melakukan kerjasama Militer dan industri keamanan dalam skala besar pada periode 1990 sampai tahun 2000 dengan Israel.

Pasca penyerangan militer Israel terhadap kapal Mavi Marmara yang mengangkut relawan dan bantuan untuk dibawa kepada pengungsi Palestina, pemerintah Turki menuntut pihak Israel untuk segera bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan 10 orang warga negara Turki. Pemerintah Turki menuntut agar Israel segera meminta maaf dan minta mahkamah Internasional segera melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut. Selain kepada Mahkamah Internasional, Turki pun mengirimkan surat resmi kepada PBB dan melaporkan Israel atas tindakan kejahatan Internasional.

**Bentuk pro Barat Turki lainnya yaitu** membentuk tatanan dunia secara global dengan usaha yang dilakukan oleh Turki adalah pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat multi-dimensional yaitu dengan menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain yang berpengaruh di dalam tata pergaulan **internasional yaitu orang-orang Barat**, seperti menjalin hubungan dengan

AS melalui NATO dan melakukan *neighborhood policy* dengan Rusia. Hal ini menyebabkan Turki semakin berhasil membentuk negaranya menjadi *bridge country*, sesuai dengan pernyataan “*Turkey is now a country that has original thoughts extending from Ankara to Pakistan, Saudi Arabia to Latin America.*” Jadi, di samping Turki berhasil mencapai *national interestnya* untuk menjadi *bridge country*, Turki juga berhasil untuk berkontribusi dalam penciptaan tatanan dunia. Elemen terakhir atau elemen keempat adalah kepentingan dalam penyebaran nilai-nilai yang dianut oleh Turki yang tertuang pada prinsip dasar politik luar negeri Turki yang terakhir, yaitu pelaksanaan *rhythmic diplomacy*. Turki beranggapan untuk menyebarkan nilai-nilai yang mereka anut agar terkenal di dalam tata pergaulan internasional (**pro Barat**) salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan *rhythmic diplomacy*. Diplomasi ini merupakan diplomasi yang dilakukan oleh Turki yang intinya Turki akan aktif dalam berbagai forum internasional guna menyebarkan nilai-nilainya dan mencapai *national interestnya*. Beberapa hal yang Turki lakukan diantaranya aktif menjadi tuan rumah dari berbagai forum internasional, seperti the NATO Summit dan the OIC Summit.

Jadi, politik luar negeri yang dimiliki oleh Turki memiliki dua sifat yang sesuai dengan penjelasan oleh Morgenthau mengenai *national interest*, yaitu rasional dan fleksibel. Dalam perkembangannya dari sebelum masa pemerintahan AKP sampai masa pemerintahan AKP, semua politik luar negeri yang dilakukan oleh Turki bersifat rasional sesuai dengan kebutuhan dan pemimpin dari pemerintahan tersebut. Kemal Pasha Atatürk dengan

sekulerismenya yang menginginkan Turki menjadi negara yang **maju sesuai dengan barat**, namun langkahnya gagal dikarenakan warga Turki yang tidak merasa nyaman dengan kemalisme (sekulerisme oleh Kemal Pasha Atatürk).

Kemudian sebelum Tayyip Erdogan terdapat perbedaan pandangan terhadap masalah Palestina antara Turki dan Israel sudah mulai nampak semenjak AKP berkuasa di Turki menjadi partai tunggal. Terlebih ketika Erdogan terpilih menjadi perdana menteri. Dengan kebijakan *strategic depth*-nya, Turki menjadikan isu sekuritisasi Palestina untuk merangkul dan mencari simpati negara-negara Arab. Selama periode 2003 hingga 2013, Turki dan Israel banyak terlibat dalam konflik. Kedua negara yang pernah dekat tersebut, kini perlahan semakin terlihat perbedaan sudut pandangnya dalam kebijakan luar negeri. Keberpihakan Turki terhadap Palestina dalam konflik yang melibatkan Israel dan Palestina di wilayah Gaza, membuat hubungan kedua negara yang bersahabat tersebut semakin merenggang. Ketegangan antara kedua negara tersebut mencapai puncaknya ketika Israel menyerang kapal relawan Turki dalam misi mengirimkan bantuan ke perbatasan Palestina. Pasca pencabutan kerjasama militer, konflik kedua negara tersebut semakin memanas ketika Turki menarik duta besarnya di Israel dan menurunkan status hubungan diplomatiknya menjadi sekertaris dua. Keadaan tersebut membuat hubungan antara Turki dan Israel semakin merenggang, walaupun Turki dan Israel masih sama-sama berstatus sebagai anggota NATO.

## **B. Politik Luar Negeri Turki terhadap Arab-Israel Sebelum Tayyip Erdogan**

Sesudah Perang Dingin, terjadi pergeseran paradigma kebijakan luar negeri Turki. Paradigma kebijakan yang berlandaskan Kemalisme (merujuk kepada nama bapak pendiri Republik Turki, Kemal Atturk) diubah menjadi neo Otomanisme. Sebagai akibatnya, dari peran yang terisolatif, Turki lantas menjalankan politik luar negeri yang lebih progresif. Ini berlangsung sejak kepemimpinan Turgut Ozal selaku Perdana Menteri (1983-1989) dan dipertahankan saat Ozal menjadi Presiden tahun 1989 hingga kematiannya pada tahun 1993. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki keuntungan dalam bermanuver di politik luar negerinya dikarenakan dua hal, yaitu letak geografis dan etnisitas yang ada di dalam negara Turki itu sendiri. Secara keuntungan geografis, Turki terletak di antara benua Asia dan Eropa. Hal ini yang menyebabkan Turki dikenal sebagai *bridge country* antara kedua benua tersebut. Sedangkan dalam hal etnisitas, Turki juga memiliki etnisitas yang beragam dikarenakan letak geografisnya, etnisitas yang berada di dalam Turki di antaranya Balkan, Timur Tengah, Caucasian, Asia Tengah, Caspian, Medditeranian, Gulf, dan Laut Hitam. Jika dilihat dari keuntungan yang ada seharusnya dari zaman dahulu sejak berdiri, Turki seharusnya memiliki politik luar negeri yang bisa dikatakan strategis. Namun, pada kenyataannya terdapat dinamika di dalam perubahan politik luar negeri Turki.

Hingga pada tahun 2002, terjadi perubahan peta politik dalam negeri Turki. Dimana pada saat itu pemilu Turki dimenangkan oleh partai AKP yang berhaluan Islam dibawah komando Recep Tayyip Erdogan. Selepas

menangnya partai AKP Turki yang berhaluan Islam moderat, dan terpilihnya Erdogan sebagai perdana menteri, secara perlahan kebijakan luar negeri Turki berubah orientasi. Ada peran yang tak biasa dimainkan oleh Turki pada pemerintahan Erdogan. Turki secara perlahan menarik kedekatannya dengan Barat. Terbukti dalam beberapa kebijakan, Turki lebih merapat kepada negara-negara Timur Tengah, terutama negara Islam. beberapa di antaranya adalah, kebijakann Turki menolak manjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer NATO untuk melakukan invasi ke Libya. Turki pun lagi lagi menolak permintaan Amerika untuk menjadikan wilayahnya sebagai pangalan militer dalam agenda invasi ke Irak.

Kepentingan dalam penyebaran nilai-nilai yang dianut oleh Turki yang tertuang pada prinsip dasar politik luar negeri Turki yang terakhir, yaitu pelaksanaan *rhythmic diplomacy*. Turki beranggapan untuk menyebarkan nilai-nilai yang mereka anut agar terkenal di dalam tata pergaulan internasional salah satu mekanismenya adalah dengan melakukan *rhythmic diplomacy*. Diplomasi ini merupakan diplomasi yang dilakukan oleh Turki yang intinya Turki akan aktif dalam berbagai forum internasional guna menyebarkan nilai-nilainya dan mencapai *national interestnya*. Beberapa hal yang Turki lakukan diantaranya aktif menjadi tuan rumah dari berbagai forum internasional, seperti the NATO Summit dan the OIC Summit, serta Turki menjadi anggota pengamat di dalam Africa Union semenjak keterbukaannya

dengan Afrika pada tahun 2005, di undang ke dalam Arab League dua kali, menandatangani perjanjian dengan negara-negara Arab pada tahun 2007<sup>17</sup>.

Perubahan yang di bawa oleh AKP dengan lebih mendekatkan diri ke Timur Tengah pada kenyataannya mendapat tantangan yang sangat besar dengan terjadinya Arab Spring. Arab Spring terjadi pada saat hubungan Turki dengan Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Uni Eropa berada pada kondisi yang tidak stabil<sup>18</sup>. Dalam kasus keterlibatan Turki di *Arab Spring*, ditemukan bahwa faktor pengaruh eksternal tidak mempunyai signifikansi yang berarti bila dibandingkan faktor pengaruh internal. Hal ini tampak dari tidak adanya alat kontrol dari aktor-aktor negara Barat sebagai faktor eksternal, untuk mempengaruhi secara efektif politik luar negeri Turki. Di sisi lain, dinamika politik domestik dalam negeri Turki, seperti munculnya signifikansi opini publik dan menurunnya dominasi militer, memiliki akibat secara langsung dalam pelaksanaan politik luar negeri Turki.

Cita-cita Turki untuk menghidupkan kembali semangat Ottoman melalui politik luar negerinya mendapat tantangan signifikan sejak Arab Spring. Terkait hal tersebut, tulisan ini juga menjelaskan politik luar negeri AKP yang saat ini yang lebih didefinisikan sebagai "*the neo-Ottomanism*". Konsep dari neo-Ottomanism tidak hanya menjelaskan politik luar negeri akan tetapi juga trend Domestik dalam *the New Turkey*. Neo-Ottomanism mempunyai tiga pilar utama, yaitu pertama, keinginan untuk kembali mendekatkan masyarakat

---

<sup>17</sup> Ahmad Dzakirin. 2012. "*Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*". (Solo: Era Adicitra Intermedia).

<sup>18</sup> Tarik Oguzlu, 2012. "Turkey's Eroding Commitment to NATO: From Identity to Interest," *The Washington Quarterly*, Center for Strategic and International Studies, Summer. hal 153-164.

Turki dengan budaya islam, dalam pengertian versi sekularisme yang lebih moderat. Dalam hal ini dikaitkan pula salah satu masalah utama Turki, yaitu etnis Kurdi. Neo-Ottomanism mencanangkan politik yang lebih terbuka bagi etnis minoritas dan masyarakat yang lebih multikultural. Kedua, karakter yang ingin dikembangkan neo-Ottomanism adalah Turki yang lebih percaya diri dalam menjalankan perannya di dunia internasional. Neo-Ottomanism memproyeksikan Turki sebagai superpower regional. Turki tidak harus terpaksa oleh Barat dalam menjalankan politik luar negerinya dan terbuka untuk segala bentuk kerjasama yang ada. Ketiga, tujuan dari neo-Ottomanism adalah semakin mempererat hubungannya dengan Barat sebagaimana kembali mendekatkan diri dengan dunia Islam. Keanggotaan dalam Uni Eropa masih merupakan cita-cita besar bagi Turki dengan tidak menyampingkan kerjasama dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah<sup>19</sup>

Selama era AKP hubungan Turki dengan Timur Tengah dan dunia Arab telah meningkat secara dramatis yang menegaskan bahwa Timur Tengah telah menjadi *focal point* dalam politik luar negeri multilateral Turki. Para pemimpin Arab dan masyarakat Arab secara luas juga telah lebih menerima kehadiran Turki dalam regional tersebut<sup>20</sup>. Pada awal tahun 2011, Turki dengan kebijakan luar negeri yang memfokuskan pada pendekatan pada negara Timur Tengah mendapat tantangan besar ketika sejumlah negara Arab mengalami pergolakan politik yang pada akhirnya berakhir dengan

---

<sup>19</sup> Nathalie Tocci, dkk. 2012. "Turkey and The Arab Spring, Implications for Tuskish Foreign Policy from Transatlantic Perspective," *Mediterranean Paper Series 2011*, The German Marshall Fund of The United States – Instituto Affari Internazionali.

<sup>20</sup> Ziya Onis, 2012. "Turkey and the Arab Spring : Between Ethics and Self-Interest," *Insight Turkey*, Vol.14 / No. 3 .



pelengseran rezim pemerintahan. Bergulirnya krisis politik di sejumlah negara Arab telah menjadi bahasan utama dalam forum-forum global. Tidak hanya negara-negara besar seperti AS, Prancis, ataupun Inggris, aliansi militer dan lembaga-lembaga internasional seperti NATO, PBB, Uni Afrika dan Liga Arab juga memberikan pengaruh yang signifikan. Kejahatan kemanusiaan, rezim otoriter dan intervensi militer merupakan beberapa isu yang menjadi sorotan selama beberapa tahun terakhir di negara-negara Arab. Berawal dari aksi protes terhadap rezim pemerintahan, intervensi militer oleh NATO kemudian dilakukan terhadap beberapa negara yang dianggap telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya. Hal ini mengundang pro dan kontra dari sejumlah negara. Ada yang menolak intervensi tersebut namun di lain pihak negara-negara tergabung sebagai motor penggerak meluasnya invasi militer.

Jadi, Politik luar negeri yang dimiliki oleh Turki memiliki dua sifat yang sesuai dengan penjelasan oleh Morgenthau mengenai *national interest*, yaitu rasional dan fleksibel. Dalam perkembangannya dari sebelum masa pemerintahan AKP sampai masa pemerintahan AKP, semua politik luar negeri yang dilakukan oleh Turki bersifat rasional sesuai dengan kebutuhan dan pemimpin dari pemerintahan tersebut. Kemal Pasha Atatürk dengan sekulerismenya yang menginginkan Turki menjadi negara yang maju sesuai dengan barat, namun langkahnya gagal dikarenakan warga Turki yang tidak merasa nyaman dengan kemalisme (sekulerisme oleh Kemal Pasha Atatürk). Tingkat estafet pemerintahan dilanjutkan dan dipegang oleh AKP (*Adalet ve*

*Kalkinma Partisi*) yang berhasil mengembalikan kembali Turki menjadi negara yang sejahtera dan masyarakat merasa aman. Sifat fleksibilitas juga ditunjukkan oleh pemerintahan AKP melihat perkembangan dunia yang cepat dan arus globalisasi yang pesat pula, AKP mencoba untuk menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan memformulasikan kepentingan luar negerinya.

Sebelumnya pada 2002 silam. Partai Keadilan dan Pembangunan yang merupakan Partai Islam Moderat memenangi Pemilihan Umum dan Recep Tayib Erdogan berhasil menjadi Perdana Menteri Turki dari partai tersebut. Pada masa pemerintahan pertama Erdogan, kebijakan luar negeri Turki masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Turki masih tetap merapat ke Barat dan melanjutkan kebijakan Perdana Menteri sebelumnya untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Turki dan Israel merupakan dua negara yang sudah mempunyai hubungan baik pasca berakhirnya perang dingin. Turki merupakan negara berpenduduk Islam mayoritas pertama yang mengakui negara Israel. Hingga pada era 90an Turki dan Israel menjalin kerjasama di berbagai bidang. Salah satu bentuk kerjasama Turki dengan Israel adalah di bidang Militer dan perdagangan. Pada bidang militer, Turki melakukan beberapa kesepakatan dengan Israel, ada beberapa kerjasama yang telah disepakati antara pemerintah Turki dengan Israel, di antaranya kerjasama keamanan dan kerahasiaan pada tahun 1994, kerjasama pelatihan pilot pada tahun 1996 dan

pelatihan militer bersama pada tahun 19<sup>21</sup> Kerjasama ini terus berlanjut hingga Erdogan telah terpilih menjadi perdana menteri Turki Seperti yang selama ini terjadi bahwa sebagian besar peralatan militer Turki masih bergantung pada Industri militer milik Israel.

Kerjasama di bidang pelatihan militer (MTCA) merupakan awal mula hubungan Turki dan Israel menjadi mitra strategis. Kesepakatan tersebut berisi tentang adanya pelatihan militer secara bersama dan pelatihan terbang sebanyak empat kali dalam setahun di wilayah udara Turki<sup>22</sup>. Kesepakatan tersebut berkembang menjadi kesepakatan industri pertahanan yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama industri pertahanan *Defence Industry Cooperation Agreement (DICA)*. Pada tahun 2010 pemerintah Turki memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut pasca insiden Mavi Marmara. Pemutusan kerjasama tersebut merupakan reaksi atas insiden yang menewaskan 10 orang warga negara Turki dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Turki menganggap bahwa Israel telah melakukan kejahatan Internasional dan mengganggu keamanan atas warga negaranya. Pemutusan kerjasama militer dengan Israel, tentu secara langsung akan mempengaruhi kekuatan militer Turki. Karena selama ini, Israel merupakan pemasok peralatan militer terbesar bagi Turki. Hal tersebut membuat Turki terutama militernya berada pada posisi dilema. Pada satu sisi, serangan kapal mavi marmara tersebut telah menelan korban bagi warga negara Turki dan

---

<sup>21</sup> Amalia Putri H, 2012. Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer Dengan Israel Tahun 2010. *Jurnal Transnasional*, Vol 3. No. 2.

<sup>22</sup> Sasley, Brent, 1998, A Structural Reinterpretation of Power in the Middle East: Explanations and implications of the Evolving Military Relationship Between Turkey and Israel, *Journal*. Ottawa, Department of Political Studies University of Manitoba.

merupakan sebuah ancaman kedaulatan bagi Turki. Namun disisi lain, selama ini Israel menjadi pemasok terbesar persenjataan Turki. Tekanan dari masyarakat Turki agar pemerintah mengambil tindakan tegas terkait insiden tersebut, membuat Erdogan mengambil keputusan atas tanggapan penolakan Israel untuk meminta maaf atas insiden Mavi Marmara, yaitu membatalkan beberapa klausul kontrak kerjasama perdagangan dan pembekuan kerjasama industri militer.

Selain itu, hubungan Turki dengan negara-negara di kawasan tidak menemukan masalah justru hubungan Turki semakin dekat dengan negara-negara di kawasan. Dalam suatu hubungan Internasional tentu mempunyai kepentingan dan tujuan nasional masing-masing, salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara adalah dengan kerjasama internasional, regional, bilateral, maupun multilateral. Kerjasama yang dijalankan bisa dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan lain-lain. Seperti halnya yang di lakukan oleh Turki dan Israel, kedua negara ini mempunyai kesamaan latar belakang sebagai negara yang menganut sistem sekuler, selain faktor lain yang mendorong keduanya sebagai implementasi dari *national interest*-nya yaitu ketika menghadapi kekuatan komunis Uni Soviet keduanya sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi untuk melawan kekuatan komunis Uni Soviet. Selain itu, Turki merupakan negara muslim pertama yang mengakui kedaulatan Israel pada tahun 1949.

Sampai pada Februari 1996, kedua negara ini sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelatihan Militer atau *Military Training Cooperation*

*Agreement* (MTCA). Kesepakatan tersebut memungkinkan Angkatan Udara Turki dan Israel melakukan pelatihan-pelatihan bersama dan bermanuver bersama sebagai suatu yang menguntungkan keduanya, latihan biasa dilakukan di pangkalan udara Ealng Anatoli, yaitu pangkalan udara yang strategis karena berdekatan dengan perbatasan Suriah dan Iran dua negara yang menentang Israel. Sampai pada akhirnya kedua negara ini memperluas kerjasam militernya yaitu dengan menandatangani Kesepakatan Kerjasama Industri Pertahanan atau *Defense Industri Cooperation Agreement* (DICA). Bentuk kerjasama industri pertahanan tersebut diantaranya adalah tentang pertukaran teknis dan pengetahuan, kesepakatan memproduksi rudal udara ke darat Popeye II senilai 100 juta dolar pada Mei 1997, penandatanganan kesepakatan senilai 3 miliar dolar untuk mengganti tank Turki dengan tank Merkava Israel dan Upgrade pesawat tempur F-5 Turki senilai 75 juta dolar oleh sebuah tender yang dimenangkan Israel Aircraft Industries pada bulan Desember 1997. Perusahaan-perusahaan industri militer Israel memang kerap memenangkan kontrak penjualan persenjataan ke angkatan bersenjata Turki dan termasuk penerima utama tender-tender untuk kebutuhan militer Turki.

Perusahaan Israel telah menjadi salah satu penerima utama tender menguntungkan bagi pengadaan peralatan militer Turki. pada tahun 2002, industri militer Israel telah memenangkan sebuah tender senilai 668 juta dollar AS. Proyek ini melibatkan pembuatan sepuluh pesawat tidak berawak dan peralatan pengintaian bagi militer Turki yang dipimpin Israel *Aerospace Industries*. Israel juga menjual peralatan elektronik dan roket ke Turki.

Namun, beberapa tahun belakangan ini hubungan kedua negara sempat merenggang, dikarenakan Embargo Israel terhadap Palestina dan serangan Israel terhadap Kapal kebebasan Mavi Marmara yang membawa sejumlah bantuan ke Jalur Gaza. Israel membunuh sejumlah anak-anak dan kaum perempuan Palestina pada tahun 2008 dan 2009. Kemudian serangan tentara Zionis Israel yang menyerang kapal kemanusiaan yang membawa sejumlah barang bantuan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza, padahal kapal tersebut masih berada di wilayah perairan internasional. Kemudian meskipun kasus ini bukan hanya antara Turki dan Israel bahkan sudah masuk dalam ranah internasional, namun Turki menunjukkan kekecewaannya terhadap Israel sebagai salah satu pihak yang dirugikan. Turki menuntut Israel untuk meminta maaf, Turki juga beberapa kali mengeluarkan kritikan-kritikan terhadap Israel, bahkan Turki memutuskan kerjasama militernya dengan Israel. Penolakan Erdogan selam dua kali berturut-turut (pada tahun 2009 dan 2010) terhadap keikutsertaan Israel dalam latihan di pangkalan udara Elang Anatoli.

Dari keputusan Turki ini, ada dampak langsung terhadap negara Turki tepatnya dampak yang lebih personal. Yaitu adanya ancaman pembunuhan terhadap Perdana Menteri Turki Recep Tayyeb Erdogan, dan kritikan-kritikan yang dilontarkan kepadanya atas kebijakan yang dikeluarkannya karena dianggap hanya sebagai permainan belaka, dan terbukti putranya masih menjalin hubungan kerjasama dengan Zionis Israel ketika hubungan Turki dengan Zionis Israel ada pada batas ketegangan. Sementara reaksi dari Israel adalah mereka sempat mengumumkan akan penolakan negaranya oleh Turki

dalam latihan bersama, negara Zionis ini tidak kaget akan keputusan Turki, karena hanya dianggap sebagai gertakan Turki yang tidak berartisi. Menteri Luar Negeri Israel Denny Ayalon berupaya menganggap kecil sikap Ankara ini, dan menganggap bahwa Turki tetap akan menjadi mitra strategisnya di kawasan Timur Tengah.

Jadi, kesimpulannya bahwa kebijakan turki semenjak dipimpin olah partai tunggal AKP, memang secara perlahan banyak terjadi perubahan, baik itu kebijakan dalam maupun luar negerinya. Menurut Huge Pop dalam tulisannya yang berjudul *pax ottoman*, kebijakan luar negeri Turki saat ini lebih terlihat menjauh dari Barat dan negara Islam wahabi<sup>23</sup> disisi lain Turki juga ingin membuat kekuatan baru yang dibangun dari ekonominya yang cukup kuat, salah satunya dengan membuka komunikasi dengan negara besar lainnya, salah satunya Rusia dan China<sup>24</sup>. Jika dilihat dari kebijakan luar negerinya, Turki pada era pemerintahan Erdogan terlihat ingin mengembalikan semangat Ottoman yang mempunyai pengaruh diantara negara-negara kawasan timur tengah. Seperti apa yang dikatakan Thomas Friedman, permohonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa adalah salah satu bentuk kamufase untuk meningkatkan nilai tawar Turki di antara negara Timur Tengah agar Turki menjadi negara yang mempunyai pengaruh dikawasan itu, namun disisi lain, Amerika dan Eropa masih menjadi tumpuan Turki dalam membuka kerjasama luar negerinya.

---

<sup>23</sup> Hugh Pope. 2010. Pax Ottomana The Mixed Succes of Turkeys New Foreign Policy. *Journal* vol 89 No. 6. Council on foreign relation.

<sup>24</sup> *Ibid.*